



MASALAH PENERAPAN SIPD UNTUK SKPD

*Bahan Materi pada Acara Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah
29-30 September 2026*



Tujuan Pembahasan

01



Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi permasalahan penerapan SIPD pada SKPD.

02



Samakan Pemahaman

Menyamakan pemahaman terhadap tata kelola pengajuan, pencatatan, dan pelaporan.

03



Konsistensi Data

Mendorong konsistensi data antara SIPD, RKUD, dan sistem terkait.

1



Konsistensi Pemilihan Pengajuan LS

1

LS Kontraktual: sejak uang muka, 95%, sampai 5% harus menggunakan LS Kontraktual.

2

LS Barang dan Jasa: sejak uang muka, 95%, sampai 5% harus menggunakan LS Barang dan Jasa.

3

Inti masalah: pilihan mekanisme pengajuan perlu konsisten sejak awal sampai penyelesaian.



1

Pembuatan STS *by system* bukan manual.

2

Entry STS TU/Pengembalian Belanja/STS Penerimaan terlebih dahulu di SIPD, kemudian dicetak.

3

Cetakan STS dari SIPD menjadi dasar setor kembali ke kasda untuk menghindari kesalahan nominal dan kode rekening.

4

Pengecualian: STS atas tahun lampau, entry di SIPD dilakukan oleh BPKPD.



1

Batas Waktu: Pertanggungjawaban maksimal 1 bulan (30 hari kalender) sejak SP2D terbit.

2

Pengajuan anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang akan direalisasikan pada bulan pengajuan TU.

3

Fokus perbaikan: ketepatan waktu dan kesesuaian kebutuhan.

4



Ketepatan Tanggal TBP

1

TBP diinput sesuai hari di mana uang tersebut riil keluar secara kas atau ditransfer ke rekening rekanan/penerima.

2

Memasukkan tanggal TBP yang melompati bulan berjalan, contoh: input 28 September 2026, tetapi TBP dibuat bertanggal Agustus, atau tidak sesuai bulan pencairan SP2D bisa menyebabkan nilai minus atau tidak sinkron pada LPJ Fungsional/LRA.

3

Dampak: LRA bulan Agustus yang dicetak hari ini dan besok dapat berbeda.

4

Perlu ketepatan waktu entry agar data pelaporan konsisten.



1

Jika terlanjur menginput Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang salah, harus dihapus atau dibatalkan secara berurutan dari tahapan yang paling akhir.

2

Dampak: Jika SPP yang salah atau tidak valid tidak segera dihapus atau dibatalkan, nilai uang yang dalam SPP tersebut akan **mengunci pagu anggaran**.

3

Ketika anggaran menipis, SKPD dapat mengalami kendala untuk mengajukan SPP berikutnya.

4

Tindakan kunci: menertibkan SPP yang tidak digunakan.



1

Tidak ada notifikasi/validasi otomatis saat mengurangi nilai anggaran di bawah nilai realisasi sehingga dimungkinkan ada belanja yang sudah direalisasikan, tetapi pada perubahan penjabaran maupun P-APBD pagu dikurangi melebihi realisasi.

2

Dampak: dapat terjadi kebutuhan setor kembali untuk menyesuaikan pagu anggaran supaya tidak terkunci otomatis/gagal validasi.

3

Perlu sinkronisasi antara realisasi dan perubahan pagu dengan prosedur manual.



1

Tanggal STS untuk pengembalian belanja, STS-TU, dan STS Penerimaan perlu sama dengan tanggal setor ke RKUD.

2

Perbedaan tanggal antara dokumen STS dan tanggal setoran maka saldo kas di sistem dan di bank tidak sinkron (*tidak balance*).

3

Ketepatan tanggal penting untuk menjaga keterlacakan transaksi dan sinkronisasi laporan.



1

Keterlambatan entry STBP dan STS Penerimaan.

2

Pendapatan harus disetor 1 × 24 jam dan entry di SIPD juga perlu dilakukan.

3

Tujuan: data pendapatan di RKUD dan SIPD dapat sinkron.



1

Ada beberapa penerimaan setoran melalui transfer BI-FAST yang belum diketahui peruntukannya.

2

Asal SKPD penyeter juga belum teridentifikasi.

3

Diperlukan penelusuran informasi agar transaksi dapat dipetakan secara tepat.



1

Dalam entry TNA, khususnya belanja modal, perlu koordinasi dengan pengurus barang.

2

Klasifikasi aset harus selaras antara E-BMD dan SIPD.

3

Ketidaksesuaian klasifikasi aset menyebabkan ketidaksinkronan data.

4

Koordinasi sejak proses entry menjadi titik penting.



1

Entry belanja BLUD perlu disesuaikan dengan SIPD BLUD.

2

Ketika belanja sudah tercatat di SIPD BLUD, di SIPD Aklap juga perlu segera dientry.

3

Saat ini masih ada entry SIPD yang dilakukan awal bulan berikutnya.

4

Dampak: penyusunan LRA bulanan harus menunggu sebagian BLUD. Entry lebih cepat juga antisipasi gangguan teknis SIPD.

Dampak Utama yang Perlu Diantisipasi



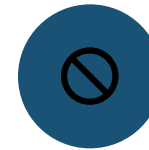
Inkonsistensi Data

Ketidakkonsistenan data transaksi dan dokumen.



Perbedaan Sistem

Perbedaan informasi antara SIPD, RKUD, E-BMD, dan sistem terkait.



Kendala SPP

Kendala pengajuan SPP akibat SPD berkurang.



Perubahan LRA

Perubahan LRA karena entry terlambat atau bertanggal mundur.



Keterlambatan Laporan

Keterlambatan penyusunan LRA bulanan.



Prioritas Penertiban Penerapan SIPD

1



Konsisten memilih mekanisme LS sejak awal sampai akhir.

2



Gunakan SIPD sebagai basis entry dan pencetakan STS.

3



Tertibkan TU, SPP, TBP, STBP, dan STS sesuai waktu transaksi.

4



Sinkronkan realisasi dengan perubahan pagu.

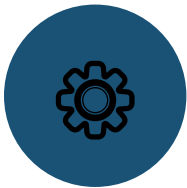
5



Perkuat koordinasi BLUD, pengurus barang, BPKPD, dan pihak terkait.



Prinsip Kerja yang Perlu Dikuatkan



Tepat Proses

Mengikuti mekanisme pengajuan yang dipilih.



Tepat Waktu

Entry dilakukan segera dan sesuai tanggal transaksi.



Tepat Data

Nominal, kode rekening, dan klasifikasi harus konsisten.



Tepat Koordinasi

Persoalan lintas sistem diselesaikan bersama.



Tepat Pelaporan

Data siap mendukung LRA dan pelaporan keuangan.

"SIPD yang tertib bukan hanya soal entry, tetapi tentang menjaga kualitas data, ketepatan proses, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah."

Pantun

Pergi ke pasar membeli pepaya,
Singgah sebentar membawa bekal.
Data tertib sejak awal prosesnya,
Laporan akurat, keuangan pun optimal.

TERIMA KASIH

Mari bersama menjaga kualitas data dan akuntabilitas keuangan daerah